

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era transformasi digital, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat. Namun, saat ini masih terdapat instansi yang menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan sistem yang ada. Salah satu upaya untuk mengatasi tantangan tersebut adalah melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang mengintegrasikan proses, data, dan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE merupakan langkah penting dalam implementasi SPBE. Arsitektur SPBE bertujuan untuk merancang kerangka kerja yang terstruktur, sehingga mempermudah integrasi antar sistem dan memastikan tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip SPBE. Selain itu, peta rencana SPBE memberikan panduan strategis bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan SPBE secara bertahap dan terarah.

Landasan hukum penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan ini mengamanatkan seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk menerapkan SPBE secara konsisten untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE juga menegaskan pentingnya pengembangan arsitektur SPBE yang terintegrasi.

Dinas ABC Kabupaten XYZ memiliki peran strategis dalam penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE di wilayah tersebut. Untuk mendukung implementasi SPBE yang lebih optimal, pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data, menganalisis kebutuhan, serta menyusun dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE. Hasil dari Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Dinas ABC dalam

merancang strategi digitalisasi yang lebih terarah dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang akan diangkat dalam Praktek Kerja Lapangan ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE yang komprehensif pada Dinas ABC Kabupaten XYZ?
2. Apa saja kesenjangan (GAP) antara kondisi eksisting dan standar yang diharapkan dalam implementasi SPBE pada Dinas ABC Kabupaten XYZ, serta rekomendasi yang dapat dilakukan?
3. Bagaimana hasil perancangan peta rencana SPBE yang terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung transformasi digital pemerintahan dan meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan publik pada Dinas ABC Kabupaten XYZ?

1.3 Tujuan PKL

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini:

1. Menyusun arsitektur dan peta rencana SPBE yang terintegrasi, komprehensif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Dinas X ABC.
2. Menganalisis kesenjangan (GAP) antara kondisi eksisting dengan standar yang diharapkan dalam implementasi SPBE, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan.
3. Menghasilkan peta rencana SPBE yang terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung transformasi digital pemerintahan serta meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

1.4 Manfaat

Adanya penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE pada Dinas ABC dapat memberikan manfaat strategis, di antaranya:

1. Memberikan panduan strategis melalui peta rencana SPBE yang dapat diimplementasikan secara bertahap untuk mendukung efisiensi tata kelola pemerintahan.
2. Mengidentifikasi kesenjangan (GAP) antara kondisi eksisting dengan standar nasional, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi peningkatan SPBE di masa mendatang.
3. Membantu meningkatkan nilai Laporan Hasil Evaluasi SPBE melalui penyusunan arsitektur dan peta rencana yang sesuai dengan standar nasional, sehingga mendukung penguatan transformasi digital di pemerintahan daerah.